

PERISTIWA KEKERASAN TERHADAP NELAYAN

(Suatu Tinjauan Sikap Kritis Nelayan Di Sumatera Utara)

KARYA ILMIAH

OLEH :

ISMAIL FAHMI, S.Pd, SH, M.Si.
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan Judul " Peristiwa Kekerasan Terhadap Nelayan" (suatu tinjauan sikap kritis nelayan di Sumatera Utara).

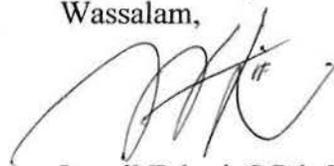
Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengusulan kepangkatan dosen akademik staf pengajar pada universitas Medan Area yang berada pada naungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Dalam penyusunan karya ilmiah yang cukup sederhana ini, saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang saya miliki. Walaupun demikian , saya berharap semoga dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dan akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 3 November 2008

Wassalam,



Ismail Fahmi, S.Pd, SH, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A.1 Latar Belakang	1
A.2 Perumusan Masalah	7
A.3.Tujuan Penulisan	7
A.3.1. Tujuan Umum	7
A.3.2. Tujuan Khusus	8
A.4. Kegunaan Penelitian	8
BAB II Tinjauan	
A. Pendahuluan	10
B. Pengertian Nelayan	12
C. Pengertian Perlawanan.....	14
D. Pengertian Kekerasan Kolektif.....	14
E. Konsep dan Teori Perlawan dan Kekerasan Kolektif	14
F. Deskripsi Provinsi Sumatera Utara	17
BAB III Beberapa Peristiwa yang Berhubungan Dengan Kekerasan Terhadap Nelayan	
1. Nelayan Tradisional Sumatera Utara Yang Terpinggirkan.....	24
2. Gangguan Disekitar Wilayah Laut	29
3. Perjuangan Organisasi Nelayan.....	31
4. Ancaman Kerusakan Alam dan Peraturan Perundang-Undangan...	34
5. Tekanan Modal Usaha	35
6. Ancaman Melewati Batas Laut Negara lain	41
BAB IV Kajian Terhadap Pembangunan Taraf Hidup Nelayan	
A. Analisis Program Kelautan di Gorontalo Sebagai pembandingan ...	46
B. Contoh Kebijakan Terhadap Kenaikan BBM	49
C. Analisis Tindakan Kekerasan Terhadap Nelayan	52
D. Deskripsi Program Dinas Kelautan	55
BAB V Pentup	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sangat mencuat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia fenomena yang menonjol pasca kejatuhan pemerintahan orde baru yaitu salah satu munculnya kebebasan berpendapat dan berekspresi dari masyarakat sipil. Dimana persoalan akses dan perhatian penguasa pemerintahan yang sering timpang, dan perlakuan kelompok tertentu yang sangat dekat dengan kekuasaan dan penguasaan menyebabkan terjadinya penetapan kebijaksanaan yang tidak memihak kepada rakyat, menjadi sumber kritik dan protes yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Menurut (Kusnadi, 2002 : 79), Seiring dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan , Kabinet Persatuan Nasional, masalah pemberdayaan masyarakat nelayan dan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, akan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional lima tahun mendatang, disamping bidang pertanian dan pengembangan usaha kecil – menengah. Selama rezim Orde Baru berkuasa, orientasi pembangunan lebih berkiblat kedaratan sehingga masalah kemaritiman cenderung diabaikan. Isu-isu dan kebijakan pembangunan kemaritiman yang ada masih terbatas pada tataran diskursus. Kecenderungan yang demikian oleh berbagai kalangan yang menaruh perhatian serius terhadap masalah pesisir dan kelautan dinilai kurang mencerminkan realitas dan karakteristik tanah air kita sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang terbesar di dunia. Kekurangan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat visioner dan tidak adanya

perencanaan serta kebijakan pembangunan kemaritiman yang komprehensif, telah berakibat serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas dikawasan pesisir.

Dalam pembangunan nasional, segenap potensi dan kemampuan modal sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam negeri, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan dan perbaikan kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai kebijaksanaan disertai langkah-langkah guna membantu, membina dan meningkatkan pertumbuhan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi rakyat sehingga mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik didalamnya termasuk kelompok masyarakat nelayan.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar. Pemanfaatan sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting sebagai sumber daya pangan dan komoditi perdagangan. Tetapi walaupun demikian realitas penduduk Indonesia yang berada disepanjang pesisir kepulauan Indonesia tetap saja memiliki hasil pendapatan yang sangat rendah. Menurut Sagoyo (1982), bahwa 80 % dari desa di wilayah pesisir pantai tergolong desa miskin dan tertinggal. Demikian juga Mubyarto (1993), menyatakan bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di daerah rawan ekologi, di pedesaan terpencil, di pegunungan sebagai petani lahan kering dan tegalan atau keluarga yang tinggal di daerah pantai sebagai nelayan.

Dengan terbentuknya satu kementerian yang khusus menangani masalah kelautan dan perikanan yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan sejak Kabinet Persatuan Nasional 1999, masalah pemberdayaan masyarakat nelayan dan strategi

pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya menyangkut perikanan menjadi salah satu agenda yang sangat penting di dalam penetapan kebijaksanaan pembangunan ke depan, sehingga orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan terhadap pembangunan darat saja. Kekurangan perhatian terhadap pembangunan kawasan kelautan dan nelayan secara komprehensif, telah berakibat yang serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan, dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas masyarakat nelayan

Di dalam melihat sumber daya laut, negara masih menganut doktrin bahwa laut adalah sebagai milik bersama (*Common Property Resources*), artinya bahwa setiap orang bebas melakukan aktivitas penggalian sumber daya laut, seperti penangkapan ikan. Kondisi semacam ini kerap akan dapat melahirkan suatu golongan yang sebenarnya bukan sebagai nelayan, namun lebih kepada sebagai pengusaha yang ingin menggali keuntungan dengan segala pemanfaatan kedekatan kepada penguasa dan mempengaruhi masyarakat nelayan dengan berbagai fasilitas dan iming-iming yang dapat merubah kehidupan nelayan.

Hal seperti ini tidak mengherankan bagi kita, apabila dalam pemanfaatan sumber kekayaan laut seperti ikan justru yang diuntungkan adalah pengusaha atau pemodal dengan segala bentuk legalitas perizinan, perlindungan (proteksi) dan relasi (koneksi) yang diperoleh dari hasil penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang kekuasaan (*abuse of power*). Dengan demikian, kesenjangan, ketimpangan yang kian menajam sangat menonjol pada masyarakat nelayan, dimana sekelompok masyarakat sangat menikmati hasil sumber daya ikan. Kelompok ini adalah mereka-mereka yang memiliki alat tangkap ikan modern seperti pukat dan sejenisnya yang didukung oleh segunung

proteksi dan perizinan. Di sisi lain sebahagian besar yaitu nelayan tradisional, tetap hidup dalam kemelaratan.

Posisi negara di dalam pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia yang pada akhirnya tidak mampu melindungi, dan memberi peluang menjadi alat dari sekelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga peranan pemerintah ditengah kehidupan nelayan menjadi tidak sehat, karena melahirkan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, sosial, ekonomi dan politik. Realitas yang ada membuktikan bahwa kehidupan nelayan tradisional yang tetap berjalan ditempat yaitu tetap berada pada posisi kemiskinan, kebodohan, kemelaratan dan ketertinggalan disegala aspek kehidupan. Lebih memprihatinkan lagi bahwa kemajuan peradaban manusia seharusnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka, justru semakin menghimpit mereka didalam ketertinggalannya, dari yang parah menjadi lebih parah lagi.

Varian penting yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang maraknya gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat nelayan diakibatkan perubahan, baik itu yang datangnya dari penguasa maupun dari para kapitalis yang dianggap dapat mensengsarakan rakyat, ini dianggap sebagai suatu upaya komunitas masyarakat luar dalam menguasai sumber daya laut sehingga mengancam kelangsungan kehidupan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup para nelayan, bahkan dinilai sebagai suatu tirani.

Pandangan yang dominan terhadap laut adalah sebagai milik bersama adalah terjadinya pemborosan sumber daya dalam bentuk over fishing, konflik penggunaan, dan kemiskinan nelayan. Ini adalah hal yang terjadi di Indonesia dewasa ini (F. Christy,

dalam Marbun, 2002 : 111). Demikian juga masih kuatnya pandangan bahwa sumber daya perikanan tidak akan ada habisnya, akan mengakibatkan derasnya arus eksploitasi ikan. Setiap individu atau kelompok masyarakat akan berupaya keras merealisasikan kepentingan-kepentingan mereka melalui eksploitasi sumber daya perikanan secara optimal. Jika keadaan seperti ini berlangsung secara terus menerus tanpa kontrol sosial secara intensif, kelangkaan dan kerusakan sumber daya perikanan serta akibat-akibat serius yang akan ditimbulkan menjadi sulit dihindari (Kusnadi, 2002 : 80).

Sementara strategi pembangunan yang diterapkan melalui infrastruktur seperti teknologi dan ekologi berjalan dari waktu ke waktu di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun disisi lain yang menjadi persoalan perubahan teknologi itu jauh meninggalkan kondisi sosial ekonomi nelayan. Kemunculan teknologi tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan dampak buruk dan ancaman besar terhadap kelangsungan hidup nelayan, dan merusak kelestarian lingkungan laut. Kapitalis laut dengan teknologi tangkap ikan yang dimilikinya, dengan segala kecanggihannya dapat memperoleh sumber ikan laut dalam jumlah yang cukup besar, mulai dari ikan-ikan kecil hingga ikan besar.

Munculnya konflik dengan skala intensitas yang beragam, baik secara terbuka maupun gerakan yang dilakukan secara laten oleh kelompok masyarakat nelayan adalah sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan dan tidak konsistennya aparat pelaksana kebijakan tersebut. Di dalam menyikapi kondisi terancamnya kehidupan para nelayan, berbagai reaksi yang timbul pada umumnya dimulai dari reaksi pasif hingga kini muncul reaksi berbentuk fisik, terbuka, dan melibatkan arus massa.

Indonesia sebagai sebuah negara kelautan, memiliki dua pertiga dari luas wilayahnya adalah terdiri dari perairan. Berdasarkan garis pantainya, bahwa terdapat kurang lebih 9.261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah di propinsi Sumatera Utara yang tidak luput dari masalah kemiskinan, ketertinggalan yang melahirkan konflik. Daerah ini memiliki luas wilayah 4339 km² yang terbagi dalam 33 kecamatan dan 617 desa/kelurahan. Mata pencaharian penduduk Deli Serdang juga sangat beragam, seperti petani, buruh kebun, pegawai negeri, pengusaha, buruh industri, nelayan dan sebagainya. Jumlah nelayan sekitar 15.998 (Data BPS Sumatera Utara, 2000). Diduga dari jumlah nelayan tersebut, nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap tradisional tersebar di beberapa daerah seperti Nagalawan, Pantai Cermin, Sialang Buah, Bagan Percut dan daerah lainnya disekitar pesisir pantai Kabupaten Deli Serdang.

Di dalam penelitian ini nantinya akan menetapkan lokasi penelitian di dua desa nelayan yaitu Bagan Percut dan Bagan Serdang yang tidak hanya melihat bagaimana nelayan secara kehidupan ekonominya, tetapi lebih memfokuskan kepada kondisi nelayan dalam menerima pembaharuan yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka tetapi mereka melakukan reaksi perlawanan dan tetap bertahan dalam kehidupan subsistensi. Sikap seperti ini pada dasarnya adalah moralitas yang disebut sebagai prinsip "mendahulukan selamat" sebagaimana Scott dalam hasil penelitiannya (1976).

Disisi lain masyarakat desa, sebagai masyarakat tradisional yang taat kepada adat dan tradisi, tidak dapat dilihat sebagai masyarakat yang statis melainkan sebagai

masyarakat yang penuh dinamika di dalam lingkungan sosial yang terus berubah (Basrowi, 2003 : 76)

A.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlawanan yang dilakukan para nelayan merupakan motif yang timbul akibat keinginan nelayan mempertahankan Budaya atau tradisi yang mereka terima secara turun-temurun dari Nenek Moyang.
2. Apakah perlawanan dan kekerasan yang terjadi pada kehidupan nelayan, adalah merupakan reaksi mereka terhadap perebutan hasil ikan.
3. Bagaimana perlawanan dan kekerasan yang terjadi pada kehidupan nelayan merupakan akibat dari perubahan dalam perspektif moral ekonomi.

A.3. Tujuan Penulisan

A.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui apakah ada perlawanan yang dilakukan oleh para nelayan di Deli Serdang, kondisi sosial ekonomi para nelayan dan apakah terjadi juga tindak kekerasan secara kolektif baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat tekanan mental kepada nelayan, sehingga dari tujuan ini akan dapat ditentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dengan menghindari terjadinya perlawanan dan kekerasan kolektif pada kehidupan nelayan.

A.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui secara lebih jelas tentang pola kehidupan nelayan tradisional.
2. Mengetahui secara lebih jelas dasar-dasar perlawanan nelayan terhadap perubahan, baik yang dilakukan oleh pihak penguasa atau pengusaha.
3. Mengidentifikasi ketidakadilan yang dialami oleh nelayan, sehingga melakukan aksi perlawanan.
4. Mengidentifikasi kekerasan-kekerasan kolektif yang terjadi pada nelayan.
5. Mencari masukkan yang kritis dan rasional dari nelayan dalam mencegah terjadinya perlawanan dan kekerasan kolektif pada kehidupan nelayan.

A.4. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara akademis kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan studi tentang strategi pembangunan yang adil dan manusiawi terhadap nelayan.
2. Dengan mengetahui data yang aktual tentang perlawanan dan kekerasan kolektif yang terjadi pada nelayan, diharapkan dapat menjadi bagian alternatif masukan yang bermanfaat terutama bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah taktis operasional dalam peningkatan kesejahteraan hidup nelayan.

3. Dapat menjadi masukan dan referensi awal kepada para peneliti yang berminat terhadap pola kehidupan nelayan tradisional.

Untuk mewujudkan karya yang baik dengan kemampuan ada sesuai dengan tujuan dan kegunaan penulisan karya ilmiah ini maka karya ilmiah ini disusun dengan judul " Peristiwa Kekerasan Terhadap Nelayan" (suatu tinjauan sikap kritis nelayan di Sumatera Utara). Dalam penulisan ini karena keterbatasan kemampuan penulis dari segi waktu dan dana maka analisis dibatasi terhadap kasus-kasus yang telah terpublikasi oleh media baik melalui media cetak dan situs-situs online terhadap peristiwa-peristiwa langsung tidak langsung yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap nelayan di sekitar wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pendahuluan

Memburuknya kehidupan nelayan termiskin disuatu daerah tidak sepenuhnya disebabkan oleh beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan besar seperti trawl, tetapi juga disebabkan oleh bekas-bekas nelayan tradisional yang telah memiliki kapal-kapal kecil bermotor. Yang jelas adalah bahwa dengan motorisasi timbul jurang yang bertambah lebar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu memanfaatkan teknologi baru itu (Mubyarto, 1984 :: 19)

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bagi mereka yang tidak mempunyai akses terhadap motorisasi kapal penangkapan ikan akan tertinggal dan ditambah lagi kemampuan untuk mengelola modal usaha dan rendahnya kemampuan dan budaya yang masih melekat pada sebahagian masyarakat pesisir, karena pada waktu dahulu mudah sekali mendapatkan hasil tangkapan ikan.

Dalam konteks demikian ,kita diingatkan tentang bakal terjadinya *tragedy of the commons* jika masyarakat nelayan gagal mengendalikan nafsunya untuk mengurus sumber daya perikanan dan mengabaikan kelangsungan kehidupan masa depan mereka . Dengan skala intensitas yang beragam, konflik sosial, baik terbuka maupun laten antar kelompok masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan sedang berlangsung diberbagai daerah pesisir. Skala konflik sosial yang relatif luas dan intensif telah terjadi diperairan Pesisir Timur Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia.

Kesadaran nelayan untuk tidak menangkap hasil laut yang masih dalam kategori kecil atau belum layak tangkap masih sangat rendah dan juga tidak adanya tindakan tegas terhadap perlakuan ini secara regulasi yang dibuat pemerintah menjadi penyumbang besar terhadap punahnya dan berkurangnya hasil tangkapan.

Sebagaimana telah terjadi di beberapa kawasan yang mengalami kondisi lebih tangkap (*overfishing*), sebagian besar dari 3000-an nelayan tradisional di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak lagi melaut karena potensi ikan di laut sudah nyaris habis disapu oleh kapal-kapal pukat harimau (*trawl*) dan kapal pukat songko. Kalau pun diantara mereka ada yang pergi melaut sehari penuh, hasil tangkapan maksimal yang diperoleh hanya 5-7 kg ikan atau udang. Namun demikian, tidak jarang pula mereka pulang tanpa membawa hasil tangkapan. Akibatnya banyak anak nelayan yang harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu lagi membayar uang SPP atau membeli keperluan sekolah lainnya.

Akhir-akhir ini, kecenderungan timbulnya antar kelompok nelayan karena klaim batas wilayah administratif perairan laut semakin meningkat. Misalnya, bagi nelayan Pekalongan Jawa Tengah, otonomi daerah tidak lebih dari malapetaka. Sejak munculnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah, pada pertengahan tahun 1999, nelayan-nelayan Pekalongan semakin sulit menangkap ikan di perairan pulau-pulau kecil di Kepulauan Massalembu, Kepulauan Kangean, dan Selat Makasar.

Kebijakan yang tidak jelas akibat otonomi daerah juga menjadi faktor penting terhadap kemungkinan terjadinya konflik antar nelayan local, dan pada akhirnya juga akan berakibat pada kehidupan nelayan itu sendiri.

B. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebahagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Orang yang melakukan pekerjaan, seperti membuat perahu, jaring, mengangkut alat tangkap beserta perlengkapannya perahu/kapal, dan mengangkut ikan, tidak termasuk sebagai nelayan. Demikian juga istri, anak dan anggota keluarga yang lain tidak termasuk sebagai nelayan (Dirjen Perikanan, 1988). Bertitik tolak dari pengertian nelayan oleh Dirjen Perikanan Departemen Pertanian ini (Kusnadi, 2002 : 2) bahwa masyarakat nelayan berdasarkan penggolongan sosial dapat ditinjau dari tiga sudut pandang.

- a. Dari sudut penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain)
- b. Dari sudut tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil.
- c. Dari sudut tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, bahwa masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional.

Sedangkan berdasarkan pendapatannya, (Marbun, 2002 : 20) nelayan dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan seluruhnya berasal dari perikanan.
2. Nelayan sambilan utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari perikanan.

3. Nelayan musiman, yaitu orang yang dalam musim-musim tertentu saja aktif sebagai nelayan.

Selanjutnya dari gambaran tentang masyarakat nelayan bahwa secara keseluruhan yang dikategorikan sebagai nelayan adalah masyarakat yang memperoleh penghasilan dari sumber daya alam laut. Didalam memperoleh hasil laut nelayan mempunyai cara yang berbeda-beda, baik itu secara modern atau secara tradisional, hal ini dapat dilihat dari alat tangkap yang digunakan yaitu nelayan modern dengan peralatan tangkap yang canggih, sedang nelayan tradisional menggunakan alat tangkap yang relatif lebih sederhana dibandingkan nelayan modern.

Nelayan kaya A yang mempunyai kapal (juragan) sehingga mempekerjakan nelayan lain sebagai pandega (jurag) tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.

1. Nelayan kaya B yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.
2. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga.
3. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk dia sendiri atau untuk isteri dan anak-anaknya.
4. Nelayan pandega atau tukang kiteng.

C. Pengertian Perlawanan

Menurut (James C. Scott 1993 : 325), Kebudayaan tani (*Folk Culture*) yang mendorong bentuk-bentuk perlawanan tertentu, serangkaian kebiasaan dan praktek yang telah berlangsung secara turun-temurun dikalangan kaum tani, serta kepentingan materil bersama dalam mengalihkan perampasan hak, biasa menghasilkan suatu bentuk koordinasi diam-diam yang meniru atau menggantikan organisasi formal. Jika bentuk-bentuk tertentu dari perlawanan sehari-hari efektif, meluas, tahan lama dan sangat terkoordinasi sebenarnya merupakan gerakan yang tidak terkoordinasi dengan tidak mengejar kebijakan dan tujuan dalam wilayah yang luas.

D. Pengertian Kekerasan Kolektif

Menurut (Galtung , 1980, dalam Sudikin 2003 : 160), Kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai atau bersama-sama, kekerasan merupakan "*any avoidable impediment to self realization.*". Maksudnya, kekerasan adalah segala sesuatu yang meyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar, namun penghalang itu dapat dihindarkan, kalau penghalang disingkirkan. Dengan pengelompokkan kekerasan kolektif (revolusi, pemberontakan, kerusuhan, pembunuhan beramai-ramai oleh massa), gerakan-gerakan sosial, dan partisipasi politik agresif.

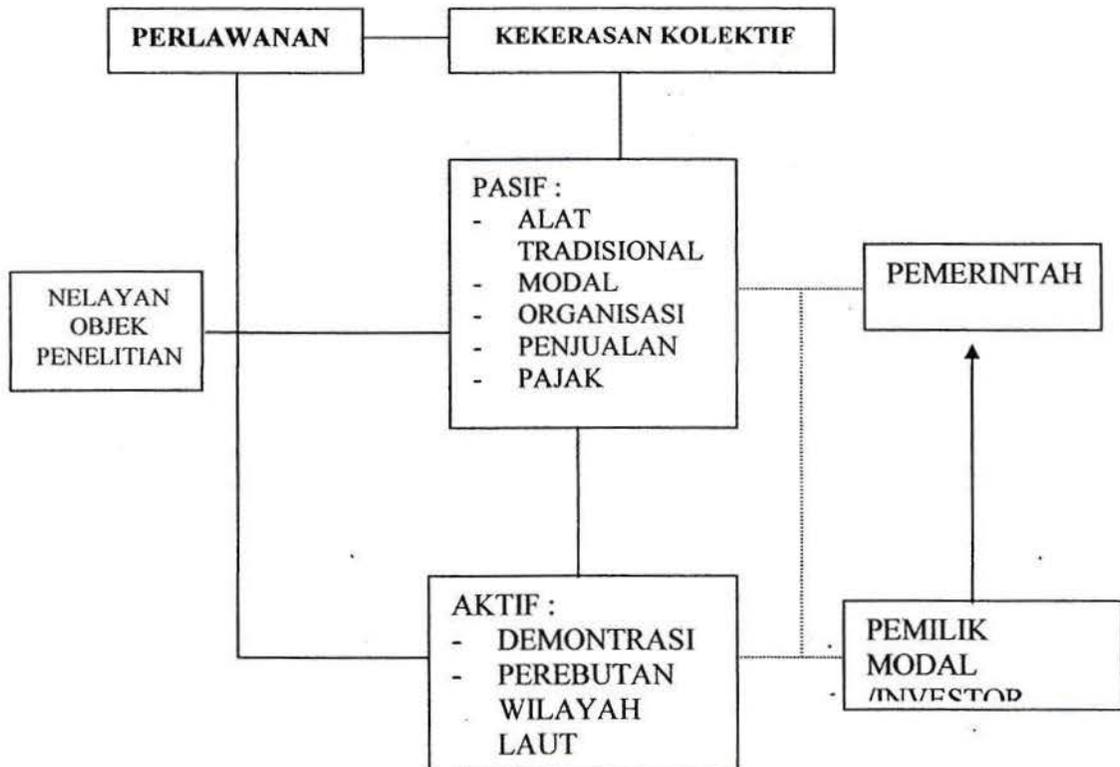
E. Konsep Teori Perlawanan dan kekerasan Kolektif

Menurut (James C. Scott. 1993 : 319), mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan Petani bukan sekedar mempertahankan diri serta rumah tangganya. Banyak dari apa yang mereka perbuat itu harus dimengerti sebagai suatu kerelaan sekalipun disertai gerutuan. Dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecilatau pekerja, dapat memaksa beberapa dari mereka untuk menyelamatkan diri dengan mengorbankan teman-teman mereka bukan merupakan pilihan dengan kata lain mendapat peluang untuk tetap hidup menjadi suatu pilihan.

Menurut (Samuel L. Popkin, 1986 : 25), Berkesimpulan bahwa Petani terutama memperhatikan kesejahteraan dan keamanan diri dan keluarga mereka. Betapun luasnya nilai-nilai dan obyektif –obyektif dia, ketika ia memperhitungkan kemungkinan untuk menerima hasil-hasil yang disukai berdasarkan pada tindakan-tindakan individual, biasanya akan berbuat dalam perilaku mementingkan diri sendiri. Selanjutnya difokuskan pada rasionalitas dari sudut pandang individual, karena apa yang rasional bagi seorang petani mungkin sangat berbeda dari apa yang rasional bagi seluruh desa atau kolektif.

Dari dua teori di atas maka penulis mencoba meyimpulkan bahwa dari teori yang dikemukakan oleh Scott melihat perlawanan petani lebih disimpulkan pada sikap untuk mencari jalan selamat dan teori yang dikemukakan Popkin sebagai sebuah sikap untuk memilih tindakan yang rasional dari individu, oleh karenanya penelitian ini akan mengamati tindakan perlawanan yang dilakukan nelayan apakah sebagai sebuah sikap untuk mencari selamat atau sebuah sikap rasional dari para nelayan.

a. Konsep Perlawanan dan Kekerasan Kolektif



Gambar. 2.1. Konseptual Perlawan dan Kekerasan Kolektif Nelayan

Dari konsep diatas dapat dipahami bahwa antara perlawanan dan kekerasan kolektif ada hubungan dimana nelayan sebagai komunitas sosiologis akan melakukan gerakan bersama manakala kehidupannya dasarnya terganggu dalam hal ini adalah mata pencariannya untuk menghidupi keluarganya, gangguan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Wilayah tempat menangkap ikan (laut)
2. Wilayah disekitar laut (karena ada aktifitas seperti tambak)
3. Gangguan akibat penggunaan tehnologi yang mengganggu kemampuan mereka.

4. Tercemarnya wilayah laut.
5. Peraturan yang menghambat aktifitas nelayan tradisional
6. konflik antara pemilik modal dengan nelayan
7. Dan lain-lain

F. DESKRIPSI PROVINSI SUMATERA UTARA

Propinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara 71.680 km², Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan.

Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke

Malaysia dan Singapura. Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan.

Sumatera Utara merupakan propinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km², sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

VISI DAN MISI PEMERINTAH SUMATERA UTARA

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, konsisten dan konsekuen, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara yang harmonis.
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan ciri identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk karena pandai menghargai adat.
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, tanpa adanya tingkat kesenjangan yang signifikan.
5. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan didalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional dalam lingkup masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan.

6. Tata pemerintahan yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatlah Misi seperti berikut ini :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
4. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dan kerjasama Regional dan Internasional.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada tor pertanian, agroindustri, pariwisata serta sector unggulan lainnya, dengan cara investasi dalam dan

luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

6. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain, komposisi pejabat di pemerintahan daerah yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Sumatera Utara yang serasi.

Secara umum dari visi dan misi Pemerintah diatas jika kita melihat bagaimana perhatian terhadap ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada sector pertanian dalam hal ini nelayan maka secara nyata akan berwujud pada perhatian yang tinggi pada kehidupan nelayan.

Indikator pembangunan dan pendidikan dibawah ini menggambarkan kepada kita bahwa secara umum pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil membawa peningkatan kearah yang lebih baik hal ini terlihat dari angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,14% dan tingkat kematian bayi yang mencapai 37 perseribu kelahiran dan juga angka harapan hidup yang baik yakni 68 tahun. Namun perlu dijelaskan bahwa data ini menggambarkan keseluruhan data penduduk Sumatera Utara.

A. INDIKATOR KEPENDUDUKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	KEADAAN 2003	KONDISI YANG DIHARAPKAN	
				2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumah penduduk	Ribu Jiwa	11.890*	12.151	12.288
2.	Pertumbuhan penduduk	Persen	1,14	1,10	
3.	Tingkat kelahiran (TFR)	Rata - rata kelahiran PUS	3,03	2,96	2,91
4.	Tingkat kematian bayi (IMR)	Perseribu kelahiran hidup	37,00	36,00	35,50
5.	Harapan hidup (e^0)	Tahun	68,00	68,20	68,50
6.	Penduduk miskin	Persen	15,89	15,50	15,00
7.	Tingkat kesakitan penduduk	Persen	16,62	16,00	15,50

Keterangan : *) Hasil Sementara Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B)

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

B. INDIKATOR KEPENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	KEADAAN 2003	KONDISI YANG DIHARAPKAN	
				2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partisipasi Sekolah				
	❖ 7- 12 tahun	Persen	98,25	98,50	99,00
	❖ 13- 15 tahun	Persen	88,51	89,00	89,30
	❖ 7-15 tahun	Persen	95,07	95,50	96,00
2.	Pendidikan yang ditamatkan				
	❖ Tidak / belum tamat SD	Persen	22,76	22,00	21,50

Peningkatan kualitas pendidikan dari table diatas sangatlah penting sebagai mana terlihat tingginya tingkat masyarakat yang belum tamat SD yakni mencapai 22,76%, dan jelas sekali bahwa keadaan ini sebahagian besar terdapat pada

keluarga nelayan, dimana sering sekali karena himpitan ekonomi keluarga membuat nelayan lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anak mereka , dan ini bias jadi akan menyumbang masalah besar nantinya bagi kualitas keluarga nelayan yang nantinya akan memilih meneruskan pekerjaan orang tuanya.

BAB III

BEBERAPA PERISTIWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP NELAYAN

1. Nelayan Tradisional Sumatera Utara Yang Terpinggirkan

Indonesia sangat kaya akan sumberdaya laut dan pesisir, tetapi ironisnya nelayan tetap hidup miskin. Nelayan yang bermu-kim di sekitar pesisir dan laut yang menggantungkan hidup pada sumberdaya di sekitarnya itu umumnya adalah nelayan tradisional. Selama ini mereka terpinggirkan, padahal banyak memberikan sumbangsih bagi kebutuhan konsumsi ikan di negeri ini. Sayangnya, tidak banyak pihak yang mau peduli dengan nasib mereka. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerin-tah yang bersifat setengah-setengah dan tidak berpihak kepada nelayan tradisional. Seperti pelarangan trawl (pukat harimau) dan alat tangkap sejenisnya yang penuh kekerasan, bantuan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik, pendidikan dan ketrampilan untuk anak-anak dan istri nelayan, pemberian izin pembukaan tambak udang yang mengancam lingkungan dan perikehidupan nelayan, dan sebagainya.

Selain memaparkan kompleksitas persoalan utama nelayan tradisional seperti kemiskinan, teknologi alat produksi, kondisi anak dan perempuan, tradisi pesisir, kebijakan publik dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut, tulisan ini juga sarat dengan fakta dan data hasil investigasi dan penelitian pada

nelayan tradisional di Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara yang menampilkan realitas kehidupan mereka. Dengan kemasan bahasa yang mudah dicerna, diharapkan tulisan ini dapat memberi pemahaman lebih dalam kepada pembaca betapa kehidupan nelayan tradisional di Sumatera Utara (dan umumnya di Indonesia), penuh dengan berbagai persoalan sehingga sangat memprihatinkan.

Setelah terpinggirkan oleh kepentingan yang lebih berkuasa, kini nelayan tradisional menghadapi kenyataan pahit, pembiaran pelanggaran hak asasi dan kedaulatan mereka. Dan akhirnya keberadaan mereka makin dilupakan orang. Berikut ini contoh kisah nelayan yang mengalami kekerasan dilaut dan minimnya perlindungan dan perlakuan mereka

Sebagai contoh Peristiwa yang dialami nelayan muda berumur 26 tahun sekitar pukul 17.00 berangkat melaut bersama kakaknya, Arifin, dan pamannya, Mondan. Mengendarai pukat sondong atau pukat songko, mereka berangkat dari Pantai Kuala Batu Bara, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan. Pukat sondong sebenarnya sejenis pukat harimau, hanya saja cara beroperasinya tidak dengan ditarik, tetapi didorong ke depan. Lewat tengah malam, cuaca sangat gelap karena langit mendung, hujan hampir tiba. Saat tengah memukat, tiba-tiba mereka melihat empat kobaran api di kejauhan. Ketika tengah mengangkat galah, tiba-tiba kilat menyambar sehingga terlihatlah kapal Jalil oleh kawanannya penyerang yang menggunakan kapal motor berukuran sekitar tiga kali delapan meter. Kapal tersebut dipenuhi sekitar 40 orang yang membawa berbagai senjata

tajam, seperti sabit, samurai, kapak, maupun balok kayu. Setelah merapatkan kapal, para penyerang mulai membacok dari samping kapal. Jalil pun segera meloncat ke laut, sedangkan abangnya Arifin, dan pamannya Mondan tidak ikut melompat ke laut. "Enggak tahu kenapa, abang saya tidak mau melompat ke laut, kalau Pak Cik saya tidak bisa berenang," katanya. Jalil pun langsung menyelam dan menjauh dari kedua kapal tersebut sehingga lolos. Setelah muncul di permukaan, dari kejauhan ia melihat kapalnya telah dibakar. "Saya terus saja berenang menuju pantai. Jalil baru bisa mencapai tepi Pantai Perupuk. Tenaganya habis setelah berenang selama kurang lebih lima jam. "Tenaga saya habis untuk berenang, sampai di rumah saya sudah tidak bisa jalan, engan terseok-seok. Esoknya, mayat Mondan ditemukan dalam keadaan terikat dengan luka bacok di kepala, bahu, dan punggung. Sedangkan mayat Arifin ditemukan dengan luka bakar di sekujur tubuh. "Abang saya badannya melepuh terbakar, sementara jaket yang dipakainya telah hangus.

Contoh lain adalah Peristiwa yang lain dialami oleh Burhanudin ia melaut bersama adiknya Rizal, dan kakaknya, Jumari. Saat tengah melaut dalam kondisi yang gelap karena mendung, tiba-tiba saja dalam jarak beberapa meter sudah muncul satu kapal motor berukuran sama dengan kapal yang menyerang Jalil. Kapal itu langsung menabrak kapal Burhanudin. Para penyerang lalu berloncatan ke kapalnya. Salah satunya langsung memukul dan mau membacok, saya pun segera meloncat ke laut dan menyelam diikuti Rizal," katanya. Burhanudin berenang menjauh bersama Rizal selama kurang

lebih 2,5 jam lamanya. Namun, Rizal yang telah cedera dihantam balok pada mata kiri dan bahunya mulai kehabisan tenaga. Ketika sudah mendekati pantai, dengan kedalaman air laut tinggal sekitar 1,5 meter, tenaga Rizal benar-benar telah habis. Ia pun tenggelam. Nasib naas juga dialami Jumari yang tidak ikut terjun ke laut karena tidak bisa berenang. Esok harinya, ia ditemukan tewas tenggelam dalam keadaan terikat. Malam berdarah itu akhirnya menewaskan sembilan nelayan. Namun, nama kesembilan nelayan tersebut masih simpang siur, antara keterangan korban selamat, ataupun aparat berwenang baik polisi maupun Lantamal I Belawan. Hal itu terjadi karena banyak nelayan yang lebih dikenal keluarganya dengan nama panggilan. Data sementara yang diperoleh Kompas dari juru bicara Lantamal I Belawan Lettu Laut M Asri Arief, kesembilan korban tewas adalah Iwan, Ijang, Kadir, Hamdan (kemungkinan ini adalah Mondan, paman Jalil), Syarizal, Komarudin, umari, Abdul, dan Suhari.

Kisah diatas menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap nelayan terjadi sementara mereka tidak dapat berbuat banyak menghadapi serangan dilaut dan tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pertolongan dari aparat penegak hukum jika pun ada sangat lambat.

Selanjunya korban selamat, ada sembilan kapal pukat sondong yang diserang. "Tujuh kapal berhasil ditemukan kembali dalam keadaan rusak, terbakar sebagian, sedang dua lagi tidak berhasil ditemukan. Saat ini, polisi telah menangkap empat tersangka, yaitu Ja (44), SJ

(39), Is alias Ma (22), dan JE alias Jun (27). Semuanya penduduk Desa Gambus Laut, Kecamatan Limapuluh, Asahan. Dari beberapa nelayan di Tanjung Tiram yang tidak mau disebut namanya, penyerangan tersebut telah salah sasaran. Sebenarnya yang dituju para penyerang adalah pukat harimau (trawl) yang selama ini beroperasi di tepi laut sehingga membuat nelayan tradisional tidak mendapatkan ikan sama sekali.

Biasanya pulang bisa membawa tiga puluh ribu, sekarang sama sekali tidak dapat ikan," katanya. Secara tidak langsung, hal itu dibenarkan Kasim YH dan Bachtiar Effendi, pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Asahan saat menjelaskan di Tanjung Tiram. Sementara itu, Direktur Operasional Lembaga Pemantauan dan Pembelaan Masyarakat Indonesia (LPPMI) Indra menyatakan, peristiwa memilukan tersebut terjadi akibat Bupati Asahan Risuddin tidak cepat tanggap. Dijelaskan, Risuddin telah membuat kesepakatan tertulis dengan Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU) pada tanggal 26 Januari 2001 bahwa pemerintah akan konsekuen dan konsisten melaksanakan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 mengenai pembatasan ruang gerak pukat harimau dan sejenisnya. Selanjutnya, tanggal 30 Juli 2001, masyarakat juga telah menyerahkan berkas pengaduan keganasan pukat harimau yang diterima bupati lewat Kabag Perekonomian Bindu Silaban. "Jika saat itu bupati tanggap, peristiwa itu tidak akan terjadi, jangan hanya tangkap nelayan kecil, tapi juga usut kenapa pukat harimau bisa beroperasi,"

katanya. Menurut Kasim, pihaknya sudah capek mengadukan keganasan pukat harimau kepada bupati maupun DPRD. "Namun, tidak pernah ada kesungguhan untuk membuat aturan pembagian daerah operasi nelayan yang sudah ditetapkan pemerintah sungguh-sungguh bisa berjalan," katanya. Akibatnya, bentrok antarnelayan sering terjadi. Di Sumatera Utara sendiri tercatat sudah berkali-kali terjadi bentrokan antarnelayan yang menelan korban jiwa. Di Tanjung Tiram, ironisnya, bentrokan terjadi antarsesama nelayan kecil. Sekalipun pukat sondong ini sejenis pukat harimau, tetapi pukat sondong yang menjadi korban adalah pukat kecil. Paling banyak bisa diawaki empat orang. "Saya setiap pulang paling membawa tujuh sampai delapan kilogram udang. Jadi, setiap hari rata-rata paling berhasil membawa Rp 20.000," ujar Burhanudin. Sampai hari ini, suasana Tanjung Tiram masih mencekam. Nelayan-nelayan kecil belum berani melaut. "Lima hari ini untuk makan anak-anak terpaksa kita pinjam ke kedai.

2. Gangguan Terhadap Wilayah Disekitar Laut

Sebuah peristiwa kelabu menimpa masyarakat nelayan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara yang baru mendeklarasikan diri beberapa bulan lalu resmi menjadi anggota (SNSU). Pasalnya, beberapa anggota mereka ditangkap polisi lantaran berunjuk rasa menolak pengerukan pasir di pantai wilayah tangkap mereka, di Kecamatan Pantai Labu. "Pengerukan tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bekerja sama dengan

pengusaha,” ujar Lahmuddin Tampubolon, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nelayan (DPN) Sarekat Nelayan Sumatra Utara (SNSU). “Pengerukan pasir direncanakan untuk pembangunan bandar udara di Kuala Namu. Untuk mendapat tanggapan atas masalah ini, SNSU pernah mengundang DPRD dan Pemkab Deli Serdang agar dapat bertemu masyarakat yang menuntut penghentian penyedotan tambang galian C tersebut”. Namun para penambang tak menggubris keluhan masyarakat nelayan, dan tetap melakukan kegiatannya hingga 13 Oktober 2008. Truk-truk pengangkut pasir yang dikerahkan dalam kegiatan itu jumlahnya mencapai ratusan unit. Hal ini merugikan masyarakat nelayan, sehingga mereka menghentikan kegiatan truk-truk tersebut, dan merusak jalan serta meletakkan kayu-kayu di jalan agar truk-truk tidak dapat melaluinya. “Masyarakat nelayan mengulangi aksi mereka di kantor DPRD dan kantor Bupati serta kantor Bapeldada yang mengeluarkan Amdal,” lanjut L. Tampubolon yang akrab dipanggil Pak Tampu ini. “Ternyata aparat yang dibantu oleh Satpol PP serta preman Loreng Merah semakin garang. Akhirnya 10 orang nelayan ditangkap dan ditahan di Polres Deli Serdang, di antaranya beberapa orang ibu ikut ditahan. Beberapa aktivis dari Walhi Sumut ikut mendampingi nelayan yang ditahan”. Namun nelayan tetap melaksanakan rencananya untuk melakukan aksi besar ke kantor Gubernur Sumatera Utara pada 30 Oktober 2008, dengan jumlah massa ribuan nelayan. Aksi ini bertujuan untuk terus menolak penyedotan pasir. Sementara itu, pihak pengusaha pengeruk pasir menyatakan bahwa mereka sudah

mengantongi ijin dari Bupati dan memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Bapedalda.

Kisah diatas menggambarkan kepada kita bagaimana gangguan yang dialami nelayan terhadap tepi pantai yang dirusak demi kepentingan tertentu yang mengancam wilayah laut tempat para nelayan mencari nafkah. Pencemaran lingkungan sering tidak terkuak kempermukaan karena licinnya para pencemar lingkungan yang melakukan berbagai cara yang tidak terpuji dari mulai menyuap para aparatur negara sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang coba mengangkat masalah pencemaran lingkungan kepermukaan.

3. Perjuangan Organisasi Nelayan

Sarekat Nelayan Sumatra Utara (SNSU) adalah salah satu bagian dari banyak organisasi nelayan yang didirikan dan diurus oleh unsur nelayan. Sejak berdiri hingga saat ini, SNSU terus bekerja melakukan perjuangan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat nelayan tertindas. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam bentuk dukungan penolakan SNSU terhadap rencana penambangan pasir di perairan laut di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. “Berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya tentang Pemberdayaan Sumber Daya Pesisir dan Laut pada 21-22 Juli 2008 di Kecamatan Pantai Labu, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan **MENOLAK** rencana penambangan pasir laut tersebut,” jelas kakek yang pernah dikejar-kejar aparat

karena dituduh membuat pertemuan gelap ini. Menurut mantan ketua rukun nelayan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan periode 1980-1994 ini, keputusan tersebut mereka ambil berdasarkan berbagai macam pertimbangan, di antaranya sesuai dengan sejarahnya bahwa pada 1968 lalu pernah ada pengerukan oleh kapal Cendrawasih yang mengakibatkan bencana kelaparan yang diderita oleh masyarakat nelayan. "Peristiwa tersebut menjadi pelajaran dan dasar bagi SNSU untuk melakukan penolakan terhadap rencana penambangan pasir laut di pantai Kecamatan Pantai Labu yang dapat mengakibatkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan," tambah Pak Tampu. Kerugian yang diderita masyarakat nelayan di antaranya, kerusakan lingkungan berupa musnahnya beting-beting di laut akibat pasir yang dihisap untuk dibawa ke darat, rusaknya terumbu karang, abrasi pesisir pantai, perubahan warna air laut akibat terangkatnya lumpur sehingga menyebabkan matinya biota/ekosistem dasar laut, intrusi (penyusupan) air laut ke permukiman penduduk dan areal pertanian, sulitnya memperoleh air bersih, dan mempersempit ruang gerak nelayan tradisional dalam menangkap ikan atau melabuh jaring. Sedang dari aspek sosial ekonomi, penambangan pasir di Pantai Labu akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena nelayan yang menangkap ikan di kawasan tersebut tidak bisa lagi beroperasi karena lingkungan telah tercemar, berkurangnya pendapatan nelayan karena ekosistem laut mati sehingga berakibat menurunnya tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di lingkungan

nelayan. Pak Tampu bukanlah wajah baru dalam carut-marutnya dunia kenelayan di pantai Sumatra Utara ini. Pada tahun 2001, ketika menjabat sebagai pimpinan SNSU, ia pernah menjadi sasaran buruan Polres Asahan menyusul bentrok fisik pada 30 Juni 2001 di perairan Gambus Laut Kabupaten Asahan yang mengakibatkan korban jiwa ABK pukot harimau. Sering pula keluarganya mendapat ancaman dari preman akan membakar rumahnya. Ia bersembunyi selama 7 bulan dari kejaran aparat, meninggalkan harta benda yang mereka miliki untuk tinggal di sebuah rumah sederhana di pesisir pantai yang terkenal, Pantai Cermin. Pada 12 Juli 2002, bersama para istri nelayan mendirikan organisasi perempuan pesisir Serikat Perempuan Nelayan Sumut (SPNSU) di desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu. Semua pengurusnya perempuan nelayan. Melalui proses yang cukup panjang, 2000-2002 bersama dengan mitra, SNSU bekerja sama dengan Jaringan Organisasi Independen untuk Penguatan Rakyat (JOIPaRa) dan Bina Desa merintis terbangunnya organisasi nelayan di tingkat nasional, Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN). Meski FSNN saat ini kurang terdengar kegiatannya, pada masa awalnya anggota federasi itu pernah mencapai 14 organisasi nelayan setingkat provinsi dan kabupaten yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan kawasan Indonesia Timur.

4. Ancaman Kerusakan Alam dan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan berbagai kebijakan dan Undang-undang di Republik Indonesia, rencana penambangan pasir di perairan Kecamatan Pantai Labu bertentangan dan tidak sesuai dengan penegakan hukum. SNSU mengumpulkan beberapa perundang-undangan yang dilanggar di antaranya: UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 5, 6, 7, Bab VI Pasal 18 s/d 19, pasal 37, dan 41), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Bab VI pasal 33 bagian 1 s/d 6, pasal 34 bagian 1 dan 2, pasal 35 bagian 1 s/d 2), UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (pasal 35 bagian e dan i, pasal 60 a s/d j), dan Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 tahun 2001 tanggal 22 Mei 2001 mengenai jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan. “Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, SNSU mengajukan tuntutan kepada pemerintah,” tandas Pak Tampu. “Tuntutan itu di antaranya menindak secara hukum atas penebangan hutan mangrove yang telah terjadi untuk mendukung rencana pengerukan/penambangan pasir laut di Perairan Laut di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan menghentikan operasi atau kegiatan rencana pengerukan pasir laut di perairan laut Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”. SNSU juga menuntut agar pihak yang berwenang tidak menerbitkan izin terhadap penambangan pasir laut di perairan laut Kecamatan

Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Semua tuntutan tersebut dipaparkan dalam surat Pernyataan Sikap SNSU tertanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Nazaruddin dan Ismail Syarif (ketua dan sekretaris Dewan Perwakilan Kelompok Nelayan/DPKN SNSU), Lahmuddin Tampubolon (ketua umum Dewan Pimpinan Nelayan/DPN SNSU), dan Jamaluddin (ketua umum Pelaut Rakyat Penunggu Indonesia/PERAPI Sumut) (disarikan dari surat Lahmuddin Tampubolon 24 Oktober 2008).

5. Tekanan modal Usaha

Contoh kesulitan modal usaha yang dialami nelayan uraiannya diulas sebagai berikut; Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, nelayan tradisional di nusantara yang memiliki kekayaan lautan sangat luar biasa ini mengeluhkan tangkapan laut yang mereka hasilkan semakin berkurang. Jangankan untuk bisa lebih, guna mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah semakin sulit. Para nelayan tradisional di sepanjang garis Pantai Timur Sumatera khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang berdampingan langsung dengan Selat Malaka mulai was-was. Pasalnya, ancaman cuaca yang tidak menentu membuat penghasilan mereka juga tidak bisa dipastikan. Ketua kelompok nelayan tradisional Usaha Karya Pantai Cermin Darma mengatakan, akibat cuaca yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksikan dengan tepat

menyebabkan penghasilan para nelayan semakin tidak menentu. "Sebentar angin timur, sebentar angin tenggara, sebentar angin barat. Tidak menentulah. Selama ini kan hanya angin tenggara dan angin barat saja, sehingga nelayan bisa mengatur strategi" tandasnya. Diakibatkan cuaca yang tidak menentu ini, air laut menjadi keruh dan jaring-jaring nelayan menjadi kotor sehingga lebih banyak dipenuhi ubur-ubur dan menyebabkan ikan takut masuk ke dalam jaring yang dilabuh. Sejak 2 bulan terakhir tandas Darma lagi, penghasilan nelayan apalagi buruh nelayan rata-rata hanya menghasilkan Rp20.000 per hari yang sebelumnya lebih dari angka itu. Untungnya bagi nelayan buruh, kerugian operasional akibat cuaca buruk yang tidak menentu ini kurang dirasakan. Justeru kerugian dirasakan 'bos' sampan atau nelayan yang memiliki sampan sendiri karena hasil tangkapan tidak sesuai dengan biaya operasional melaut yang dikeluarkan. Untungnya lagi papar Darma, maraknya kampanye menghadapi pemilu legislatif 9 April 2009 mendatang menjadi alternatif bagi beberapa nelayan yang tidak bisa melaut mencari tambahan uang dari ikut berkampanye.

Kondisi ini juga diakui Ahmad Baihaqi alias Alun dan Syamsul warga Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang. Cuaca buruk di laut mengakibatkan pendapatan mereka sehari-hari yang mengandalkan dari hasil melaut sebagai nelayan tradisional juga turut memburuk. "Cuaca buruk, ya..gak bisa melaut lah. Mau dibilang gimana lagi ?" ungkap Alun sembari menambahkan, bahwa nelayan sangat bergantung dengan cuaca angin di laut. Ungkapan senada juga dilontarkan Eko Purwanto dan Samijo. Kedua nelayan

tradisional asal Desa Pematang Biara Pantai Labu ini juga mengeluhkan kondisi cuaca yang turut mempengaruhi hasil tangkapan mereka. “Rejeki nelayan ini tidak bisa dipastikan. Kadang bisa dapat banyak, tapi sering juga tidak mendapatkan hasil tangkapan. Kalau sudah cuaca laut buruk, ya buruk juga lah penghasilan kita ” tandas Samijo. Pasca pengerukan pasir di perairan Pantai Labu yang digunakan untuk penimbunan kawasan mega proyek bandara Kualanamu, para nelayan tradisional merasakan manfaat pengerukan tersebut. Sebab, perairan tersebut kini lebih mudah dilalui karena tidak lagi dangkal dan tidak mengharapakan hanya saat air pasang untuk bisa melaut. Bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan Purwanto dan Samijo, puluhan nelayan tradisional di Dusun III Desa Pantai Labu Pekan justeru mengalami kendala pasca pengerukan pasir di perairan Pantai Labu.

Pasalnya kata Alul warga Dusun tersebut, muara yang menjadi lajur lintasan keluar masuknya sampan mereka menjadi terkendala. Sebelumnya, sampan mereka bisa melaju menuju perairan Pantai Labu meski kondisi air laut dalam keadaan surut. Namun pasca pengerukan pasir, muara yang menjadi lajur utama tidak bisa dilalui lagi tatkala air laut sedang surut. Akibatnya, puluhan nelayan tradisional yang menambat sampannya di Dusun III tersebut tidak bisa pergi melaut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah lama mereka lakoni. Permasalahan lain justru mereka alami bila nelayan tidak siap dengan kondisi pada saat air laut sedang pasang. Keberadaan jembatan permanen yang berada di Desa Paluh Sibaji di hilir muara tersebut bisa menjadi penghalang

bagi nelayan untuk keluar menuju laut lepas bila pasang terlalu tinggi. “Kalau waktunya terlewat, nelayan tidak bisa melaut karena sampan terhalang jembatan untuk keluar” tandasnya.

Hal lain contohnya adalah; Abdul Hafiz tokoh pemuda Pantai Labu menyikapi berbagai permasalahan nelayan mengatakan, selain masalah cuaca akhir-akhir ini yang kurang menguntungkan nelayan tradisional, minimnya alat tangkap yang dimiliki dan masih sangat sulit bagi nelayan untuk mendapatkan dana pinjaman dengan pengembalian terjangkau menjadi kendala untuk mengubah potret kehidupan mereka. Dengan hanya mengandalkan modal fasilitas apa adanya, sangat sulit bagi nelayan tradisional untuk meningkatkan pendapatan mereka. “Kalau pun ada pinjaman modal, pengembaliannya sulit terjangkau dengan penghasilan nelayan yang tidak tetap” tandasnya. Minimnya perhatian pemerintah menyebabkan banyak nelayan terjebak dalam perangkap tengkulak yang secara teoritis tidak dirasakan nelayan pada awal perjanjian. Seiring dengan proses waktu berjalan, perangkap tengkulak baru dirasakan nelayan yang sudah terikat janji dan kontrak serta sulit keluar dari perangkap jebakan tengkulak yang ‘menghisap’ hasil keringat nelayan. Karenanya, perhatian serius pemerintah kepada para nelayan khususnya nelayan tradisional di Pantai Labu sangat dibutuhkan mengingat sejauh ini perhatian yang benar-benar intens dalam pembinaan nelayan belum pernah dilakukan pemerintah Senada dengan kritik Abdul Hafiz, Ketua Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU) Lahmuddin Tampubolon menegaskan, sejauh ini pemerintah belum memberikan pembelaan

terhadap kehidupan nelayan dengan tegas-tegas membela nelayan yang hanya bergantung dari hasil tangkapan melaut. Salah satu contoh kasus yang dihadapi semua nelayan tradisional di Indonesia yakni peraturan tentang operasional pukat trawl dan sejenisnya yang masih merajalela merambah dengan cara 'merampas' lahan tangkapan nelayan kecil. Meski saat ini pemerintah dan DPR RI sedang mempersiapkan Rancangan UU tentang Perikanan tahun 2009 yang akan diundangkan menggantikan UU nomor 31 tahun 2004, di dalamnya tidak ada ketegasan pemerintah yang mengatur tentang alat tangkap dan pengawasan terhadap operasional alat tangkap pukat trawl dan sejenisnya. Padahal menurut catatan SNSU, tandas Tampubolon, sejak tahun 1993 sampai 2008 tercatat sebanyak 83 nelayan tewas akibat bentrok di laut terkait beroperasinya pukat trawl dan sejenisnya yang telah mengganggu nelayan tradisional. Beroperasinya pukat-pukat besar di perairan wilayah tangkapan nelayan tradisional menjadi salah satu penyebab yang sudah menjadi isu nasional termasuk di Sumatera Utara. Aksi pukat-pukat besar oleh pemilik maupun awaknya yang tidak memperdulikan lingkungan kelautan menyebabkan rusaknya terumbu karang yang berdampak semakin terancamnya biota laut. Akibatnya, perekonomian nelayan terutama nelayan tradisional dan buruh nelayan semakin terjepit ditambah lagi bila cuaca buruk sehingga tidak bisa melaut dan akhirnya 'isi periuk' pun harus kosong serta menambah daftar rintihan mereka. "Rusaknya terumbu karang, otomatis membuat biota laut juga menjadi rusak dan ikan-ikan tidak lagi berkembang biak diakibatkan tidak ada tempat dan matinya bibit baru disebabkan system tangkap

trawl tersebut” paparnya. Bila terumbu karang rusak, tentu berdampak kepada penghasilan para nelayan di laut. Dan wajar pula bila kehidupan nelayan terus dalam keadaan miskin dengan semakin berkurangnya hasil tangkapan dilaut plus cuaca yang saat ini mendukung bagi nelayan untuk melaut. Sepertinya, kondisi dan karakter ini sudah mengakar. Yakni, potret kehidupan komunitas masyarakat pesisir di belahan nusantara ini selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Fakta ini semakin diperkuat dari ungkapan Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Syamsul Muarif saat berkunjung ke Pantai Cermin Serdang Bedagai (Sergai) Medio Januari 2009 lalu, bahwa angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi mencapai 32 persen. Di Sumatera Utara, angka kemiskinan masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir pantai menurut anggota DPRD Sumut H Andjar Amry SH diprediksikan mencapai 80 persen. plus tingkat pendidikan masyarakatnya sangat minim dari sebuah pendidikan yang ideal. Data ironis juga dipaparkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Ir H M Ramlan Matondang MSc, dari 12.610 jiwa masyarakat nelayan pesisir pantai di Sergai, sekira 60 persen kehidupan ekonominya dalam keadaan miskin dan perlu upaya-upaya pembinaan agar terjadi perubahan ke arah lebih baik. Akankah rintihan ‘pilu’ nelayan dibalik kekayaan alam bahari nusantara ini terus berlangsung.

Kemampuan yang kurang memadai dari sistem alat penangkapan ikan membuat para nelayan sulit bersaing dengan nelayan yang menggunakan

tehnologi modren dalam hal ini pemodal besar membuat nelayan tradisional semakin miskin dan mungkin akan berada dibawah garis kemiskina, tidak jarang mereka harus berurusan dengan lintah darat demi untuk mempertahankan hidup, jika hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah bisa dipastikan dalam waktu yang tidak lama nelayan tradisional akan semakin terpuruk. Dan sumbangan terhadap garis kemiskinan secara nasional akan bertambah.

6. Ancaman Melewati Batas Laut Negara Lain

Contoh kekerasan yang dilakukan tentara asing adalah sebagai berikut ;
Pepatah “Menyelam sambil minum air”, merupakan pepatah Melayu yang bermakna mengambil kesempatan pada setiap peluang yang terbuka. Inilah yang dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) terhadap enam orang nelayan asal Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagei (Sergei), Sumut. Kabar yang tak sedap itu diberitakan oleh semua koran terbitan Medan dalam minggu-minggu ini, lengkap dengan gambar para nelayan yang menjadi korban kejahatan tentara laut negeri jiran itu. Sebanyak enam nelayan Pekan Sialang Buah dengan Kapal Motor (KM) Bintang Laut yang ditekongi (juru mudi) Syafaruddin (35 tahun), pada Kamis (16/4) Subuh bertolak dari Sialang Buah melaut untuk menangkap ikan. Kapal mengarah ke Pulau Berhala (masuk wilayah Kabupaten Sergei) dan alat penunjuk posisi (Geo Position Satelite) menunjukkan berada 46 mil dari bibir pantai Sialang Buah. Ini menunjukkan

posisi kapal nelayan itu masih berada dalam wilayah perairan Indonesia. Selain tekong, para nelayan itu masing-masing Ulul Azmi (24 tahun), Johanuddin (27 tahun), Herman Saputra (37 tahun), yang keempatnya warga Desa Pekan Sialang Buah. Kemudian Syafriuddin (33 tahun) dan Johan (27 tahun) warga Desa Pematang Guntung, masih di kecamatan yang sama. Mereka sudah berpengalaman menjaring ikan di sekitar Pulau Berhala, akan tetapi kini menghadapi bala, yang datangnya dari tentara laut Malaysia. Ketika sedang sibuk menangkap ikan, sekitar pukul 10.00 WIB muncul kapal patroli TLDM dengan menggunakan KM Laksamana nomor lambung 137. Kapal patroli itu meniupkan terompet sambil merapat dan memerintahkan para nelayan untuk naik ke kapal patroli. "Rapat, rapat, naik ke kapal," kata tekong Syafaruddin menirukan perintah awak kapal patroli Malaysia itu. Setibanya di atas kapal patroli Malaysia, dua nelayan Sergei itu yakni Syafaruddin dan Syafriuddin tanpa tanya atau basa basi langsung digimbal dengan sadis. Demikian nasib yang menimpa empat nelayan lainnya yang diperintahkan naik ke kapal patroli itu. Para nelayan Sumut itu dipukul, ditendang dan bahkan dicambuk dengan selang yang ada besi pada ujungnya. Tubuh para nelayan itu berbilur-bilur, karena mereka diperlakukan tidak manusiawi. Para nelayan Sergei itu tidak tahu apa kesalahan mereka, karena mereka menangkap ikan masih di perairan Indonesia. Tindakan TLDM merupakan pelanggaran wilayah dan mengobok-obok kedaulatan Indonesia. Perbuatan sadis dan brutal yang dilakukan TLDM itu masih terus berlanjut

dan hampir mirip dengan penyiksaan yang dilakukan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, terhadap pejuang-pejuang dari Irak, Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Setelah satu jam disiksa dengan berbagai gaya dan alat kekerasan, tindakan brutal itu bukannya berhenti. Para nelayan Sergei itu disiksa lebih biadab lagi. Badan mereka disulut dengan puntung rokok dan kemudian mereka dipaksa untuk menelan puntung rokok yang masih membara. Tidak puas dengan penyiksaan yang biadab itu, para nelayan itu dijemur di dek kapal yang terbuat dari besi di panas terik matahari yang menyengat kulit. Akibatnya kulit para nelayan itu melepuh. Setelah menyiksa para nelayan, tentara laut Malaysia merompak ikan hasil tangkapan nelayan terutama ikan kerapu dan bawal. Nelayan itu dipaksa memindahkan isi kapal itu ke kapal patroli dengan todongan senjata api dan cambuk. Perompakan itu mengakibatkan nelayan menderita kerugian sekitar Rp 15 juta. Kasus tindakan brutal, sadis dan perompakan itu dilaporkan para nelayan tersebut pada Kasat Polairud Sergei, Iptu Suwito Widodo yang merasa prihatin melihat nasib nelayan, yang mengais rezeki di tengah laut di negaranya sendiri. Ia menjanjikan, meneruskan laporan tersebut pada Dit Polairud Poldasu. Widodo percaya, para nelayan itu masih berada dalam wilayah perairan Indonesia, sehingga kasus ini diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terasa janggal jika kapal patroli TLDM yang dilengkapi dengan peralatan teknologi canggih, yang komandannya perwira lulusan akademi, tidak mengetahui batas wilayah perairan sehingga main pukul, sulut dan berbagai tindakan brutal

lainnya. Terdapat sejumlah kemungkinan, bahwa tindakan brutal itu merupakan kurikulum selama pendidikan di sekolah tentara laut, sehingga mereka tidak mengerti sopan santun untuk saling menyapa. Jumlah mereka juga lima kali lipat dibandingkan dengan nelayan, bersenjata api sehingga merasa wilayah Pulau Berhala itu warisan nenek moyangnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan, personil TDLM merupakan kelompok lanun yang kerjanya merompak di perairan Selat Malaka, yang selama ini selalu rawan dengan tindak kejahatan. Jika mereka memang benar-benar tentara laut suatu negara, mustahil terjadi tindakan brutal, sadis dan bengis. Untuk itu TNI-AL dan Sat Pol Airud yang berpangkalan di berbagai pelabuhan di wilayah Sumut harus meningkatkan patroli di Selat Malaka, dalam upaya menjaga wilayah kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi para nelayan yang mengais rezeki di laut. (www.antarasumut.com)

Peristiwa diatas jika melihat arogansi yang dilakukan oleh tentara asing sangat perlu dilakukan tindakan tegas melalui hubungan diplomatik dan jika kasusnya menyakut proses hokum maka tindakan advokasi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi warga Negeranya yang terkait kasus Hukum dengan Negara lain dan termasuk melindungi dari perlakuan semena-mena dari tentara atau polisi asing terhadap nelayan tradisional yang disebut juga fungsi diplomatik. Banyak para nelayan tidak memiliki pengetahuan tentang geografis laut Indonesia jadi selain fungsi diplomatik sebenarnya tindakan penyuluhan dengan memberikan pengetahuan dasar bagi

nelayan bagaimana mengetahui batas laut Indonesia ketika sedang melaut sangat penting ini merupakan aspek pencegahan agar para nelayan tidak tersangkut kasus melanggar batas laut Negara lain. Disisi lain Angkatan laut kita harus lebih giat mengawal wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi kecemburuan tentang terhadap pelanggaran laut kita dan tidak terjadi pencurian hasil laut kita.

BAB IV

KAJIAN TERHADAP PEMBANGUNAN TARAF HIDUP NELAYAN

A. Analisis Program Kelautan di Gorontalo sebagai Pembanding

Penuturan Gubernur Gorontalo, pertama kali ketika bertugas yang dilakukannya adalah mencari data tentang profil ekonomi masyarakat petani dan nelayan, karena mereka merupakan mayoritas penduduk Gorontalo. Data yang saya peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa saat itu ada sekitar 30.100 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang beranggotakan sekitar 125.000 jiwa (14,79%) dari total penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2002 yaitu 845.166 jiwa. Mereka menggantungkan hidupnya pada ekonomi kelautan dan perikanan. 98.200 jiwa dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Struktur sosial ekonomi RTP di Provinsi Gorontalo saat itu masih berbentuk piramida ini mencerminkan betapa tingginya ketimpangan sosial ekonomi di sektor perikanan. 85,85% atau 25-840 RTP adalah nelayan tanpa perahu motor dengan alat tangkapan sederhana, 13,95% atau 4.200 RTP digolongkan ke dalam nelayan tingkat menengah yang mampu memiliki perahu dengan motor tempel, alat tangkap agak modern seperti pancing rawai, gill net, mini purse seine alat tangkap lainnya, sedangkan nelayan papan atas hanya ada sebanyak 60 atau 0,20% mereka telah mampu memiliki armada kapal motor. Nelayan rata-rata hanya memiliki kesempatan melaut sekitar 8 bulan dengan

pendapatan rata-rata antara Rp 133.333 hingga Rp 200.000. Pada umumnya masyarakat pesisir terutama nelayan yang bermukim di sepanjang pantai menempati rumah tinggal yang sangat sederhana, mereka sebagian besar terutama anak-anak mengidap gizi buruk, ironisnya mereka sebagai nelayan tetapi jarang makan ikan, karena hasil tangkapan langsung dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Saya memutar otak bagaimana caranya melakukan percepatan pengurangan kemiskinan pada masyarakat nelayan. Pikiran saya mengatakan bahwa harus ada master plan yang disusun dari hasil survei lapangan dan studi ilmiah untuk pembangunan ekonomi kelautan dan pengembangan masyarakat pesisir. Saya mengundang kawan-kawan dari Fakultas Perikanan IPB untuk membuat master plan tersebut. Mereka melakukan studi lapangan di Gorontalo sebagai bahan untuk menyusun master plan pengembangan masyarakat nelayan/pesisir dan ekonomi kelautan. Tim IPB yang diketuai oleh Profesor. Tridoyo berhasil merumuskan pola pengembangan masyarakat nelayan/pesisir dan ekonomi kelautan ke dalam 11 model. Kesebelas model tersebut adalah menyangkut perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, budidaya perikanan, koservasi dan wisata bahari, desa nelayan, pengembangan SDM kelautan, Pengembangan pelabuhan udara cargo, marine industri, pengembangan kota pantai, pengembangan pulau-pulau kecil, serta pengembangan energi angin dan

gelombang. Model yang disampaikan oleh Tim IPB memang ideal tetapi untuk melaksanakannya membutuhkan resources yang sangat besar. Resources yang dimiliki Provinsi Gorontalo sangat terbatas oleh karenanya harus memilih beberapa model pengembangan yang mampu memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi nelayan dan model itu harus mampu menarik perhatian pemerintah pusat. ada daya magnet yang besar yang mampu menginduksi nelayan oleh karenanya saya menggunakan Teluk Tomini sebagai titik masuk untuk memasarkan pembangunan perikanan dan brand Gorontalo ke luar daerah.

Saya mempunyai gagasan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut harus didedikasikan untuk memfasilitasi sumber penghidupan masyarakat pesisir dan nelayan serta untuk mendorong perkembangan ekonomi wilayah. Oleh karenanya pembangunan perikanan dan kelautan harus difokuskan pada pembentukan "etalase kelautan" yaitu suatu kawasan dengan sekumpulan model-model pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dengan keragaman sumber daya, sistem pemanfaatan, sistem kelembagaan yang berkinerja optimal dan bijak sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep etalase kelautan ini adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sinergitas pengembangan perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, budidaya perikanan, desa nelayan, dan pengembangan SDM Perikanan sehingga mampu menjadi

penggerak ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan. peran yang harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kerangka pembangunan kawasan yang berbasis sumber daya pesisir dan kelautan adalah (1) memposisikan diri sebagai sentra utama pengembangan kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya, dan (2) menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai etalase kelautan. Kedua peran ini akan mampu meningkatkan leverage Provinsi Gorontalo dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan empat sumber daya utama yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan (kebijakan, infrastmktur), sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.: (Muhammad Fadel : 2008).

Jika melihat dari kondisi gagasan dan ide yang sudah dimplementasikan oleh Gubernur diatas maka jika hal seperti ini dilakukan di provinsi Sumatera Utara khususnya pada sektor kelautan akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup nelayan.

B. Contoh Kebijakan terhadap Kenaikan BBM terhadap Nelayan

Keputusan pemerintah yang berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 % - 30 % diyakini akan memberikan dampak secara signifikan terhadap sektor riil, termasuk diantaranya adalah sektor kelautan dan perikanan. Dampak kenaikan tersebut, antaranya adalah: (1) meningkatnya biaya

operasi penangkapan ikan sehingga kehidupan nelayan akan semakin berat; (2) meningkatnya biaya produksi usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan; dan (3) berkurangnya hari operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada saat pertemuan Forum Stakeholders Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari I, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Sebagai ilustrasi, bidang perikanan tangkap didominasi oleh nelayan skala kecil dan menengah dengan jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 556.200 unit. Berpijak pada kondisi inilah, kebutuhan BBM untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 2.331.600 kilo liter atau sekitar Rp. 12,89 triliun lebih, (asumsi harga BBM jenis solar mencapai Rp 5.530 per liter naik 28,7% dari harga Rp. 4.300,-) yang terdiri 1.852.200 kilo liter untuk nelayan dan 479.400 kilo liter untuk pembudidaya ikan. Dalam rangka pengurangan subsidi BBM di sektor kelautan dan perikanan tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) pemberian keringanan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan; (2) meminta kepada Pertamina untuk meningkatkan kuota BBM dalam optimalisasi SPDN (225 unit) yang tersebar di 136 Kab/Kota pada 31 Provinsi dalam melayani

kebutuhan BBM nelayan, dan masyarakat perikanan lainnya; dan (3) bantuan langsung tunai masyarakat nelayan yang miskin ke desa pesisir.

Disamping itu, DKP juga akan terus melakukan upaya untuk mengurangi beban masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) pengembangan mata pencaharian alternatif untuk nelayan; (2) pemanfaatan energi alternatif (DKP telah mengalokasikan 3.831 unit listrik tenaga surya dan 8 reaktor biogas di 15 Provinsi.); (3) melakukan pembangunan 26 unit SPDN dan pengajuan perizinan ke Pertamina sebanyak 47 unit; (4) menerapkan teknologi dan alat bantu penangkapan yang hemat BBM; (5) pengembangan budidaya ikan yang tidak menggunakan BBM; (6) peningkatan kepastian dan stabilitas pendapatan nelayan; (7) pengembangan model desa nelayan mandiri energi; (8) pengembangan biofuel di Cilacap; (9) penyebaran peta fishing ground yang difasilitasi pelabuhan perikanan dan dinas provinsi; dan (10) pemberian bantuan kredit sebanyak 400 pengolah dan pemasar di 10 lokasi masing-masing minimal sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, untuk meringankan beban hidup nelayan dan masyarakat perikanan dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait, diantaranya melalui: (1) bantuan Nasional; (2) asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) bagi nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya dari Departemen Kesehatan; (3) Beras Miskin

(Raskin) bagi nelayan dan masyarakat pesisir dari Bulog; (4) mendorong peningkatan jumlah dan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan; dan (5) bantuan-bantuan lainnya yang dapat meringankan beban hidup nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya. Sedangkan untuk jangka panjang, mengantisipasi dampak kenaikan BBM tersebut DKP telah menyiapkan beberapa program sebagai berikut: (2) pemberian subsidi benih, (2) pemberian subsidi es untuk pengolah hasil perikanan, (3) pengembangan setnet sebagai alternatif alat penangkapan pasif dan tanpa BBM, (4) pengembangan perairan umum sebagai salah satu sumber alternatif pemenuhan target produksi melalui pamacuan stok ikan, (5) mengkaji pengurangan kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP); dan (6) penggunaan biofuel dan energi alternatif lainnya (wind power, electrical power, solar cell).

Kebijakan yang berhubungan dengan kenaikan BBM diatas langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas hidup nelayan, secara khusus kehidupan nelayan di wilayah provinsi Sumatera Utara.

C. ANALISIS TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP NELAYAN

- Tindakan Kekerasan Langsung

Sebagaimana fungsi-fungsi pemerintah terhadap warga Negara sebagai *political state* yakni memelihara ketertiban dan ketenangan, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi diplomatic dan fungsi perpajakan (Siagian Sondang: 101) dari

uraian ini teori tentang pembangunan ini berlaku pada warga negara yang didalam bahagiannya adalah nelayan yang membutuhkan aspek pembangunan sehingga tindak kekerasan langsung atau tidak langsung dapat dicegah dan diselesaikan dengan baik.

Dari data yang diulas dari bab III maka beberapa tindakan kekerasan yang terjadi terhadap nelayan adalah perompakan dilaut dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Negara Asing terhadap Nelayan Indonesia, dalam hal ini maka tindakan yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Patroli Angkatan laut Republik Indonesia
2. Melakukan perjanjian Kerjasama dengan Negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan Indonesia
3. Memberikan pemahaman yang jelas bagi nelayan Indonesia tentang batas laut yang boleh di eksplorasi oleh nelayan.
4. Melakukan advokasi bagi warga Negara (nelayan) yang terlanjur mengalami masalah hukum secara maksimal.
5. Memberikan fasilitas komunikasi bagi nelayan sehingga jika mereka membutuhkan bantuan dapat berhubungan dengan penegak hukum dan juga memiliki kemampuan dasar untuk membela diri.

- Tindakan Kekerasan Tidak Langsung

Dari uraian bab III kita juga dapat menemukan kerusan lingkungan yang terjadi baik dilaut maupun dikawasan sekitar laut yang akan berpotensi menimbulkan

kekerasan kolektif sebagai mana telah diuraikan pada bab II, jika tempat untuk mencari nafkah nelayan rusak maka secara otomatis Nelayan akan terganggu penghasilannya dan jika penghasilannya terganggu maka pada akhirnya mereka dalam hal ini nelayan akan melakukan gerakan mencari sumber kerusakan tersebut dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik antara kelompok yang mengakibatkan kerusakan dengan para nelayan, oleh sebab itu beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan analisa yang tepat sebelum memberikan izin bagi pengusaha yang akan berinvestasi pada wilayah laut.
2. Melakukan penegakan hukum yang adil pada perusak lingkungan.

Pada bab III juga dijelaskan tentang adanya kekurangan modal usaha yang terjadi pada nelayan kecil, hal ini jika dilihat sebagai suatu malah kesejahteraan karena dengan keterbatasan modal ternyata berimbas secara simultan bagi penghasilan yang rendah, penghasilan yang rendah menurut kajian administrasi pembangunan akan merupakan lingkaran yang saling terkait termasuk pengangguran dan akan dekan dengan tindakan kriminal. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Penyuluhan tentang bagaimana memanfaatkan dan mengelola modal usaha yang dimiliki oleh nelayan.

2. Memberikan bantuan modal bergulir kepada nelayan yang kemudian setelah berhasil akan digulirkan kembali kepada nelayan lain
3. Memberikan pendamping kepada kelompok nelayan yang dapat mengevaluasi tentang peningkatan taraf hidup nelayan
4. Melakukan monitoring secara berkala tentang perkembangan kualitas hidup nelayan.

D. Deskripsi Program Dinas Kelautan

Contoh; Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Visi Dinas Perikanan Dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai adalah : Sumber daya alam kelautan dan perikanan didayagunakan sebagai sumber penghidupan yang lestari menuju masyarakat maju, tentram dan kompetitif.

Adapun misi adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
- Meningkatkan peran sektor Perikanan dan Kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan usaha perikanan dan kelautan yang berorientasi ekonomi aquabisnis.
- Mengembangkan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara lestari dan berkesinambungan

Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan

- Melakukan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Perikanan dan eksplorasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang Perikanan dan eksplorasi Kelautan yang menjadi Kewenangan Kabupaten
- Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang Perikanan perlindungan laut yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- Melakukan pengelolaan, peminan usaha, dan pelayanan perijinan di bidang Perikanan dan eksplorasi Kelautan.
- Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai dan Pulau Kecil.
- Penelitian dalam bidang Perikanan Spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah, serta pengujian penerapan teknologi anjuran.

- Melaksanakan kerjasama Perikanan dan Kelautan antara daerah maupun antara daerah dengan masyarakat Internasional.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan/ Peralatan.

Dipilihnya serdang Bedagai sebagai contoh terhadap program dinas Perikanan dan kelautan didasari wilayah laut yang luas dan merupakan Kabupaten baru di Sumatera Utara, sehingga jelas tergambar bagi kita sebenarnya pemerintah mempunyai program yang banyak untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan.

BAB V

PENUTUP KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Selain memaparkan kompleksitas persoalan utama nelayan tradisional seperti kemiskinan, teknologi alat produksi, kondisi anak dan perempuan, tradisi pesisir, kebijakan publik dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut, disini juga sarat dengan fakta dan data hasil investigasi dan penelitian pada nelayan tradisional di Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara yang menampilkan realitas kehidupan mereka. Dengan kemasan bahasa yang mudah dicerna, diharapkan buku ini dapat memberi pemahaman lebih dalam kepada pembaca betapa kehidupan nelayan tradisional di Sumatera Utara (dan umumnya di Indonesia), penuh dengan berbagai persoalan sehingga sangat memprihatinkan. Setelah terpinggirkan oleh kepentingan yang lebih berkuasa, kini nelayan tradisional menghadapi kenyataan pahit: pembiaran pelanggaran hak asasi dan kedaulatan mereka. Dan akhirnya keberadaan mereka makin dilupakan orang.

1. Pada bab III menggambarkan kepada kita bagaimana gangguan yang dialami nelayan terhadap tepi pantai yang dirusak demi kepentingan tertentu yang mengancam wilayah laut tempat para nelayan mencari nafkah.
2. Pada bab III tergambar bagaimana kekerasan terhadap nelayan terjadi sementara mereka tidak dapat berbuat banyak menghadapi

serangan dilaut dan tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pertolongan dari aparat penegak hukum jika pun ada sangat lambat.

3. Peristiwa ini sebenarnya harus diadvokasi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi warga Negeranya yang terkait kasus Hukum dengan Negara lain dan termasuk melindungi dari perlakuan semena-mena dari tentara atau polisi asing terhadap nelayan tradisional yang disebut juga fungsi diplomatik. Banyak para nelayan tidak memiliki pengetahuan tentang geografis laut Indonesia jadi selain fungsi diplomatik sebenarnya tindakan penyuluhan dengan memberikan pengetahuan dasar bagi nelayan bagaimana mengetahui batas laut Indonesia ketika sedang melaut sangat penting ini merupakan aspek pencegahan agar para nelayan tidak tersangkut kasus melanggar batas laut Negara lain. Disisi lain Angkatan laut kita harus lebih giat mengawal wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi kecemburuan tentang terhadap pelanggaran laut kita dan tidak terjadi pencurian hasil laut kita.
4. Keterbatasan Pengetahuan juga menjadi masalah sangat penting yang banyak dialami nelayan sehingga mereka sering harus berhadapan dengan hukum Negara lain.
5. tindakan yang kurang terhadap penegakan hukum dilaut seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik modal besar terhadap laut dan nelayan asing yang masuk kewilayah laut Indonesia menjadi masalah yang juga tidak kecil.

B. SARAN

Melihat relitas diatas demi peningkatan kesejahteraan bagi nelayan dalam mencapai keadilan bagi rakyat kecil dalam hal ini nelayan perlu disaran beberapa tindakan sebagai berikut :

1. Nelayan merubah etos kerjanya kearah yang lebih giat lagi.
2. Pemerintah memberikan peningkatan pengetahuan nelayan dengan penyuluhan-penyuluhan yang menyangkut tentang wilayah laut Indonesia dan aspek penggunaan tehnologi bagi perikanan
3. Pemerintah memberikan bantuan modal bergulir bagi nelayan kecil dan selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
4. Pemerintah melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap tindakan merusak lingkungan disekitar wilayah laut dan laut
5. Aparat keamanan lebih meningkatkan patroli terhadap wilayah laut Indonesia untuk mencegah terjadinya pencurian ikan dan kekerasan dilaut.
6. Apabila ada peristiwa pelanggaran yang dilakukan nelayan Indonesia yang terkait dengan wilayah laut Negara lain advokasi hukum harus dilakukan semaksimal mungkin.

7. Perlu ada tindakan khusus melalui hubungan diplomatic untuk melindungi nelayan kita dari tindakan semena-mena pihak asing dan kembali menegaskan tentang keberatan terhadap *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dajan, Anto, 1984, Pengantar Metode Statistik Jilid I, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Juliantono, Ferry J, 2000, Tanah untuk Rakyat, Puzam, Jakarta
- Kusnadi, Drs. M.A., 2002, Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Ikan, LKIS, Yogyakarta.
- Marbun, Leonardo dan Krishnayanti Ika N, 2002, Masyarakat Pinggiran yang Kian Terlupakan, JALA, Sumatera Utara
- Mubyarto, 1984, Nelayan dan Kemiskinan, *Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta
- Popkin, Samuel L, 1986, Petani Rasional, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta
- Scott, James C, 1993, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang, 1988, Administrasi Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta
- Sudikin dan Basrowi, 2003, Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya
- Tambunan, Dr. Friez R, 2002, Pembangunan Yang Dilematis, *Sebuah Tinjauan Kritis Terhadap Kasus PT. Indorayon Utama dari Perspektif Keadilan*, Yayasan Aku Percaya, Jakarta
- Wolf, Eric R, 1985, Petani, *Suatu Tinjauan Antropologis*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta
- WWW. Antara.Co.id
- WWW. Kompas.co.id
- WWW. Harian SIB.co.id